

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pondok Pesantren merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan dan keagamaan. Tidak hanya dalam pendidikan, organisasi nirlaba juga mengelola keuangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tidak menguntungkan satu pihak. Menurut Sartono (2000), tujuan utama dibentuknya organisasi nirlaba adalah menyediakan jasa kepada masyarakat sekitarnya bukan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Pendapat tersebut didukung oleh Nainggolan (2005: 1), organisasi nirlaba adalah suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaannya kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata.

Organisasi nirlaba tidak berorientasi pada laba, tetapi harus melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Dalam mengelola keuangan maka dibutuhkan sistem akuntansi untuk dapat melaporkan gerak-gerik keuangan suatu organisasi. Menurut Mulyadi (2010: 3), sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Pernyataan tersebut didukung juga oleh Reeve, dkk (2010: 9), secara

umum akuntansi (*accounting*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Selanjutnya, Islam telah menganjurkan untuk melakukan pencatatan dalam setiap transaksi.

Anjuran ini terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 282, yang artinya:

“Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. (Qs. Al-Baqarah: 282)”

Sistem akuntansi merupakan suatu tolak ukur untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik dan benar. Menurut Harahap (2011: 4), akuntansi adalah alat mengukur suatu alat pertanggungjawaban sekaligus informasi. Saputri (2015) mengemukakan bahwa laporan keuangan harus dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK), dan terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas, pengungkapan mengenai kebijakan akuntansi dan catatan yang menyertai laporan keuangan.

Financial Accounting Standard Board (SFAC No. 3), telah menyusun standar untuk laporan keuangan yang ditujukan kepada pemilik entitas nirlaba. FASB juga berwenang untuk menyusun standar akuntansi bagi entitas nirlaba nonpemerintah. Nainggolan (2005: 43) menyatakan bahwa laporan keuangan menjadi penting karena didalamnya memuat informasi mengenai bagaimana organisasi mengelola sumber daya yang ada, berapa besar sumber daya yang dimiliki, serta pencapaian apa saja yang telah diperoleh dengan sumber daya.

Informasi akuntansi yang dihasilkan berupa laporan keuangan sangat diperlukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, maka laporan keuangan organisasi nirlaba harus disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2010: 45.3) dalam PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, laporan keuangan untuk entitas nirlaba terdiri atas laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk entitas bisnis pada umumnya.

PSAK 45 (2010: 45.2-45.3) menyatakan sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan, menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut. Entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. Salah satu contoh organisasi nirlaba adalah pondok pesantren.

Pondok pesantren didirikan membangun pendidikan di Indonesia untuk menciptakan generasi yang berpegang teguh dalam nilai-nilai

keagamaan, dan nilai-nilai sosial. Pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang banyak menampung peserta didik dari pedesaan, setelah lulus mereka akan kembali kedesa masing-masing. Ini berarti pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan terdepan di Indonesia untuk membekali lulusannya, tidak saja ilmu agama, bahkan juga masalah kewirausahaan (Djakfar, 2011: 65).

Menurut Zuhriy (2011), pesantren adalah salah satu institusi yang unik dengan ciri-ciri khas yang sangat kuat dan lekat. Peran yang diambil adalah upaya-upaya pencerdasan bangsa yang telah turun temurun tanpa henti. Pesantrenlah yang memberikan pendidikan pada masa-masa sulit, masa perjuangan melawan kolonial dan merupakan pusat studi yang tetap survive sampai masa kini.

Selanjutnya Pradini, dkk (2016), menganggap pesantren menjadi salah satu unsur pendidikan Islam di Indonesia yang sedang berjalan tradisional. Madjid dalam Pradini dkk (2016), menganggap bahwa peran pesantren sebagai institusi yang identik dengan makna Islam sekaligus menyiratkan pribumi Indonesia. Komunitas pesantren mengeksplorasi pelajaran Islam dan mempraktikannya sebagai cara hidup (*tafaqquh fi al-din*) dengan menekankan pentingnya moralitas dalam kehidupan sosial.

Pelaporan keuangan Pondok Pesantren sangat diperlukan untuk mengukur sejauhmana pencapaian yang telah dilaksanakan oleh pihak Pondok Pesantren. Pelaporan keuangan tidak hanya dibutuhkan oleh pihak Pondok Pesantren saja, pihak-pihak pemberi dana juga harus

mendapatkan informasi tentang laporan keuangan. Menurut Arifin dan Riharjo (2014), pelaporan keuangan dasar dan penyajian informasi selain melalui laporan keuangan merupakan bentuk pengungkapan informasi. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.

Penelitian tentang laporan keuangan pesantren telah dilakukan sebelumnya oleh Salamah (2013) meneliti tentang Studi Mengenai Sistem Pengelolaan Keuangan Sekolah Di Pondok Pesantren Terhadap Penguatan Manajemen Keuangan. Perencanaan keuangan pondok pesantren Al-Kholidin sama seperti perencanaan keuangan sekolah pada umumnya, dalam pelaksanaan manajemen keuangan Kiyai pondok pesantren Al-Kholidin merupakan otorisator penuh terhadap pengeluaran keuangan, pelaporan keuangan pondok pesantren Al-Kholidin dilakukan setiap bulan, semester dan tahun, dalam pelaksanaan pengawasan keuangan pondok pesantren Al-Kholidin tidak melalui kepala sekolah SMP/SMA/Diniyah Al-Kholidin karena proses keuangan langsung terpusat pada kiyai.

Lebih lanjut penelitian Diyani Ade Rizky dan Yazid Yud Padmono (2013) meneliti tentang “Analisis Penerapan PSAK No.45 Pada Yayasan Mesjid Al Falah Surabaya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Yayasan belum mempunyai pedoman struktur organisasi yang memisahkan pembagian wewenang, dan tanggung jawab. (2) Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan PSAK No. 45, namun terdapat sebagian akun yang belum disajikan sesuai dengan PSAK No. 45 yaitu

klasifikasi aset bersih. (3) Pengakuan kerugian piutang diakui secara langsung. Penelitian ini di dukung oleh penelitian Zainal Arifin dan Ikhsan Budi Riharjo (2014) tentang, “Pertanggungjawaban Keuangan Pondok Pesantren: Studi Pada Yayasan Nazhatut Thullab”. Pondok Pesantren Nazhatut Thullab belum menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 tentang entitas nirlaba. Dalam menyusun laporan keuangan, Yayasan hanya menyajikan laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas dimana pencatatan tersebut tidak sesuai dengan pos-pos pengkalsifikasian yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku disebabkan karena Yayasan tidak mengenal standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman pelaporan keuangan entitas nirlaba.

Pondok Pesantren Wahdah Islamiyah masih tergolong sangat baru dan berbeda dengan Pondok Pesantren lainnya, dimana sumber dana yang didapatkan bersal dari dua sumber yaitu dari pihak Pemerintah dan pihak Yayasan. Dengan adanya perbedaan sumber dana maka Pondok Pesantren Wahdah Islamiyah menyajikan dua pelaporan keuangan yang berbeda pula yaitu pencatatan yang diterapkan oleh pihak Pemerintah dan pihak Yayasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian pada pesantren Wahdah Islamiyah yang ada di Gorontalo tentang proses pelaporan keuangan yang digunakan oleh pondok pesantren. Seperti apa sistem pelaporan keuangan di pesantren wahdah Islamiyah?. Terlebih lagi dalam melakukan suatu pencatatan kita

harus teliti dalam mengelola keuangan, bisa jadi pengelolaan ini akan berdampak pada perkembangan kedepannya.

Maka demikian judul yang diambil oleh peneliti adalah **“Sistem Pelaporan Keuangan Pada Pondok Pesantren Wahdah Islamiyah di Gorontalo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem pelaporan keuangan Pondok Pesantren Wahdah Islamiyah di Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan sistem pelaporan keuangan Pondok Pesantren Wahdah Islamiyah di Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi Pesantren. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian akuntansi pesantren dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pengelola keuangan pesantren dalam hal pengelolaanya serta pertanggungjawabannya dalam melakukan pelaporan keuangan pondok pesantren.